

MEMAHAMI MAKNA DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN DEMOKRASI

**Dany Try Utama Hutabarat^{1*}, Nuria Sinta², Nur Aulia Dwiva³, Muhammad Abiyyu
Raihandi⁴, Ari Ardiansyah⁵, Sazri Febrian⁶, Ghani Akbar⁷**

^{1,2,3,4,5}

Fakultas Ekonomi Universitas Asahan

E-mail: ^{1*)} danytryhutamahutabarat@gmail.com, ²⁾ nuriasinta90@gmail.com,

³⁾ nurauliadwiva@gmail.com, ⁴⁾ abiyyuraihandi12@gmail.com, ⁵⁾ ariardiansyah8901@gmail.com,

⁶⁾ syazrifebriyan@gmail.com, ⁷⁾ ganiakbar734@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna demokrasi dari pendidikan demokrasi. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara baik yang sedang memerintah (penyelenggaraan negara) maupun yang tidak sedang memerintah (warga negara biasa). Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang akan menjadi struktur demokrasi.

Kata Kunci: *Demokrasi, Pendidikan Demokrasi, Struktur Demokrasi*

Abstract

The purpose of this study is to identify and comprehend the meaning of democracy through democratic education. This research method is qualitative approach based on a literature review. Democracy is a way of life that must develop and flourish in citizens, both those in positions of authority (state administration) and those who are not in positions of authority (ordinary citizens). This democratic way of life will result in a democratic culture. To support the form of government and political system, a positive attitude toward life and a democratic culture are required. Democracy education essentially establishes a democratic culture that will eventually become the democratic structure.

Keywords: *Democracy, Democracy Education, Democratic Structure*

1. PENDAHULUAN

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan dengan Negara. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek subjek hukum yang menyangkut hak hak sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang wajib diakui atau (*recognize*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai hak

negara yang wajib diakui (*recognized*) dihormati (*respected*) dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga Negara (Asshiddiqie, 2005).

Warga negara dapat berarti warga, anggota dari suatu negara atau sekelompok dari manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu (Sapriya & Winataputra, 2004). Sedangkan, kewarganegaraan merupakan status hukum dan identitas karenanya terkandung dalam pengertian itu dua dimensi objektif dan subjektif secara objektif, kewarganegaraan terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan negara secara spesifik dan dimensi subjektif berkaitan dengan kesetiaan rasa memiliki terhadap Negara (Heywood, 1994).

Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. menurut Ernest renan seorang guru besar universitas sorbonne bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas kesatuan yang terdiri dari orang-orang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa suatu asas spiritual. Negara diartikan dengan organisasi tertinggi Diantara Satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat (Thohawi & Suhaimi, 2019).

Negara demokrasi adalah suatu negara dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan dan bisa juga diartikan pemerintah. Bentuk negara demokrasi dikenal ada dua macam yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi Langsung yaitu suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh semua warga negara dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara dilakukan secara langsung semua warga Negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh rakyat yang dilaksanakan melalui badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Pemilu yang bebas dan adil, partai politik yang demokratis, dan hubungan sipil militer yang menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia bergerak relatif maju. Namun kemajuan itu lebih banyak didorong oleh keteguhan sebagian dari masyarakat sipil melalui partisipasi populer dan media yang relatif bebas tetapi tidak sepenuhnya demokratis independen. ancaman tersebar datang dari partai politik yang tidak demokratis pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel juga inferioritas sipil dan Ambisi militer.

Bentuk demokrasi prosedural yang relatif cukup baik dapat dilihat selama pemilu 2004 dan mencatat tantangan besar Pilkada. relatif tidak ada kemajuan berarti untuk situasi seputar tema kewarganegaraan yang setara namun tampak kemunduran besar dalam konteks hak-hak sipil dan politik proses-proses dalam supremasi hukum masih berjuang, tetapi tetap terkontaminasi korupsi. Desentralisasi sudah menjadi terhentikan dengan hasil yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia meskipun tercatat upaya-upaya resentralisasi. Sementara itu, hasil penelitian Pusat Kajian politik, Departemen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia dan Center for democracy and human (DEMOS) tahun 2011 menyimpulkan bahwa indeks demokrasi Indonesia diperoleh angka sebesar 4.9. Ini berarti cenderung berada di tengah jika diukur dari skala 0 hingga 10. variabel atau indikator yang digunakan adalah 4 prinsip demokrasi yaitu: otonomi, kompetisi, pluralisasi dan Solidaritas. Jadi menurut penelitian ini indeks demokrasi Indonesia berada dibawah angka rata-rata yang menggambarkan bahwa Demonopolisasi bahkan belum setengah jalan. angka indeks dikisahkan adanya perkembangan dan pencapaian yang timpang antara konsep penopang demokrasi dalam proses transisi yang berlangsung hingga saat ini demokrasi Indonesia

ditopang oleh liberalisasi politik yang cukup tinggi namun secara kontras tidak diikuti oleh Eka ekualisasi di area ekonomi yang sangat rendah .

Berdasarkan cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa Untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mengukur Seberapa jauh variabel atau indikator yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi itu dijalankan di Indonesia Sudah barang tentu, prinsip yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai parameter demokratisasi di Indonesia. Sekarang yang menjadi permasalahannya bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia dengan dasar pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data. Pertama, sumber bahan cetak (kepuustakaan), meliputi buku, dan literatur hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi. Kedua, sumber data berupa artikel-artikel dari internet.

Teknik pengumpulan data dan sumber informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi belajar pustaka. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Emzir, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas 2 dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing Tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri. Pendidikan nasional nasional bukan semata-mata untuk perkembangan intelektual atau pekerja yang terampil tetapi seorang yang cerdas dan bermoral serta kreatif. Pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil dari masyarakat. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat demokrasi. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia Illahi pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan demokrasi yang membangun karakter dan budaya demokrasi dalam kehidupan politik bangsa di negara Indonesia telah dilaksanakan khususnya sejak berakhirnya era orde baru dan lahirnya era reformasi. Namun, perlu direkonseptualisasi, sehingga lahir paradigma pendidikan demokrasi yang bukan hanya secara konstitusional ada, tetapi secara instrumental dan praksis benar-benar terjadi dan memberikan dampak pedagogis dan sosial-kultural kumulatif bagi peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi dan ber-HAM di Indonesia. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, internalisasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi bagi warga negara, sehingga menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, demokratis dan beradab (Azra, 2002).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, social trust* dan *political participation* serta kemampuan

mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, juga bagi masyarakat (Zamroni, 2002).

Negara demokrasi adalah suatu negara dengan Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *Demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang artinya kekuasaan dan bisa juga diartikan pemerintah. bentuk negara demokrasi dikenal ada dua macam yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi Langsung yaitu suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh semua warga negara keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan negara dilakukan secara langsung semua warga negara sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu suatu negara yang pemerintahannya dilakukan oleh rakyat yang dilaksanakan melalui badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

1) Makna Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

Menurut Plato, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintah itu dipegang oleh Rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Menurut Aristoteles, Demokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk sedang yang baik disebutnya *polity* atau *politeia*. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Rozak et al., 2003). Menurut International Commission for jurist, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Budiardjo, 2003).

2) Demokrasi sebagai sistem politik

Menurut Henry B Mayo demokrasi sebagai sistem politik adalah demokrasi yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Budiardjo, 2003).

3) Demokrasi sebagai sikap hidup

Menurut Mohammad Hatta, demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik (Winarno, 2006). Henry B Mayo mengatakan bahwa demokrasi adalah nilai satu penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian penguasa secara teratur, penggunaan paksaan sedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, pengakuan penghormatan atas kebebasan (Budiardjo, 2003).

Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang didalam diri warga. Negara baik yang sedang memerintah maupun yang tidak sedang memerintah. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan Anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal yaitu struktur dan kultur (Zamroni, 2002).

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal formal dan non formal secara informal, pendidikan demokrasi biasa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi secara formal, pendidikan

demokrasi dilakukan di sekolah baik dalam bentuk Intra dan ekstrakurikuler. Secara non formal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya partai politik, pers dll. Penting untuk memberi perhatian mengenai pendidikan demokrasi formal yakni di sekolah atau lembaga pendidikan lain termasuk pendidikan tinggi. Sekarang ini mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Permendiknas No 22 Tahun 2006)

Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara baik yang sedang memerintah (penyelenggaraan negara) maupun yang tidak sedang memerintah (warga negara biasa). Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi titik sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi di negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki titik demokrasi paling tidak mencakup dua hal yaitu struktur dan kultur (Zamroni, 2011).

Warga negara yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis Menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi sebagaimana dikatakan Mbah Muller dalam (Winataputra, 2001) Bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan yakni: tingkat perkembangan ekonomi perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan. Jika masyarakat tumbuh budaya demokrasi maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis Melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan kesadaran dan nilai-nilai demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi.

Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal, *pertama* kesadaran bahwa Demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga negara itu sendiri. *Kedua*, Demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. *Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Zamroni, 2011).

Perjalanan demokrasi di Indonesia warga mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi di warga negara juga mengharapkan pemerintah yang dihasilkan melalui Melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingan kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu Keluhan dari warga negara bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Menurut Mohammad Hatta, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan (Winarno, 2006). Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi asli memiliki 5 unsur yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

Saat ini ide demokrasi terungkap dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 yaitu Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar 1945 . Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Sementara itu, secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi pancasila agar tegak dan berkembang dikhususkan pada 10 pilar demokrasi, yakni: (1) Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) demokrasi dengan kecerdasan; (3) demokrasi yang berkedaulatan rakyat; (4) demokrasi dengan rule of law; (5) demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara; (6) demokrasi dengan hak asasi manusia; (7) demokrasi dengan peradilan yang merdeka; (8) demo demokrasi otonomi daerah; (9) demokrasi dengan kemakmuran; (10) demokrasi yang berkeadilan sosial (Sanusi, 2007).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara baik yang sedang memerintah (penyelenggaraan negara) maupun yang tidak sedang memerintah (warga negara biasa).
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat demokrasi sistem pendidikan nasional yang demokratis
3. Negara demokrasi adalah suatu negara dengan Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan dan bisa juga diartikan pemerintah. bentuk negara demokrasi dikenal ada dua macam yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
4. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis Melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan kesadaran dan nilai-nilai demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi.
5. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintah itu dipegang oleh Rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi*.
Azra, A. (2002). *Pardigma Baru Pendidikan Nasional: rekontruksi dan demokratisasi*.

**REVIEW OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATION, CULTURE
AND PEDAGOGY
(ROMEO)
VOLUME 1 ISSUE 2 (2021)**

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Heywood, A. (1994). *Political Ideas and Concepts: An Introduction*. New York: St. Martin's Press.
- Rozak, A., Sayuti, W., & Syafrani, A. (2003). Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani [Civic education: democracy, human rights and civil society](revised edition). Jakarta, Indonesia: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in Collaboration with The Asia Foundation and Prenada Media.
- Sanusi, A. (2007). Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi. *Dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PMPKn FPIPS UPI.
- Sapriya & Winataputra, U. S. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung: Laboratorium PKn-FPIPS UPI.
- Thohawi, A., & Suhaimi, A. (2019). *Materi Civic Education*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Winataputra, U. S. (2001). J. pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi: S. kajian konseptual dalam konteks pendidikan I. (Doctoral dissertation, U. P. I. (2001). *Jatidiri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi: Suatu kajian konseptual dalam konteks pendidikan IPS*.
- Zamroni. (2002). *Demokrasi dan Pendidikan Dalam Transisi : Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah Menengah*.
- Zamroni. (2011). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Gavin Kalam Utama.